

II. TINJAUAN PUSTAKA

Setelah merumuskan latar belakang masalah yang menjadi alasan dalam mengambil masalah penelitian, pada bab ini penulis akan merumuskan konsep-konsep yang akan berkaitan dengan objek penelitian melalui tinjauan pustaka.

Tinjauan pustaka berisi tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan objek penelitian. Tujuannya untuk membantu dalam menghubungkan hasil penelitian dengan teori-teori yang telah dikemukakan oleh ahli.

Untuk menghubungkan hasil penelitian dengan teori yang dikemukakan oleh ahli, di bawah ini akan dijelaskan teori atau konsep yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu :

A. Tinjauan Tentang Masyarakat Desa

1. Pengertian Masyarakat Desa

Menurut Soekanto (2006:26) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka suatu kesatuan sosial dengan batasan-batasan yang dirumuskan.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama yang memiliki tata cara hidup dengan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama.

Menurut Koentjaraningrat (2005) berpendapat bahwa masyarakat desa adalah “masyarakat desa merupakan sebuah komunitas kecil yang memiliki ciri-ciri yang khusus dalam pola tata kehidupan, ikatan pergaulan dan seluk beluk masyarakat pedesaan, yaitu 1) para warganya saling mengenal dan bergaul secara intensif, 2) karena kecil, maka setiap bagian dan kelompok khusus yang ada di dalamnya tidak terlalu berbeda antara satu dan lainnya, 3) para warganya dapat menghayati lapangan kehidupan mereka dengan baik. Selain itu masyarakat pedesaan memiliki sifat solidaritas yang tinggi, kebersamaan dan gotong royong yang muncul dari prinsip timbal balik. Artinya sikap tolong menolong yang muncul pada masyarakat desa lebih dikarenakan hutang jasa atau kebaikan.”

Jadi dapat diartikan bahwa masyarakat desa menurut Koentjaraningrat adalah kelompok masyarakat yang hidup saling mengenal satu sama lain dengan mengedepankan rasa kebersamaan dan gotong royong.

Menurut Shahab (2007), secara umum ciri-ciri kehidupan masyarakat pedesaan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Mempunyai sifat homogen dalam mata pencaharian, nilai-nilai dalam kebudayaan serta dalam sikap dan tingkah laku
- 2) Kehidupan desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi yang berarti semua anggota keluarga turut bersama-sama memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga
- 3) Faktor geografi sangat berpengaruh atas kehidupan yang ada. Misalnya, keterikatan anggota keluarga dengan tanah atau desa kelahirannya,
- 4) Hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan awet dari pada kota.

Jadi masyarakat desa menurut Shahab dapat diartikan sekelompok orang yang tinggal dalam suatu wilayah yang memiliki berbagai kesamaan dan memiliki hubungan yang dekat satu sama lain.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa adalah sekelompok manusia yang hidup jadi satu yang memiliki persamaan baik kebiasaan atau tradisi yang sama maupun mata pencaharian dengan mengedepankan kebersamaan dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat dan dekat satu sama lainnya.

2. Ciri-ciri masyarakat desa :

Menurut Soerjono Soekanto (2007) menggambarkan masyarakat desa sebagai masyarakat tradisional yang mengenal ciri-ciri sebagai berikut :

1. Kehidupan masyarakat sangat erat dengan alam
2. Kehidupan petani sangat bergantung pada musim
3. Desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja
4. Struktur perekonomian bersifat agraris
5. Hubungan antar anggota masyarakat desa berdasar ikatan kekeluargaan
6. Perkembangan sosial relatif lambat
7. Kontrol sosial ditentukan oleh moral dan hukum informal
8. Norma agama dan adat masih kuat

B. Tinjauan Tentang Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) adalah orang atau seseorang yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk

desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

Menurut PP Nomor 72 Tahun 2005 dalam pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa kepala desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 tahun 2000 kepala desa adalah orang yang berkedudukan sebagai alat pemerintah, alat pemerintah daerah dan alat desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian Kepala Desa adalah orang atau seseorang yang dipilih langsung oleh masyarakat yang ada di daerah atau wilayah tertentu untuk dijadikan sebagai pemimpin dalam desa tersebut.

2. Wewenang Kepala Desa

Menurut PP Nomor 72 Tahun 2005 disebutkan bahwa wewenang Kepala Desa adalah:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran
5. Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
6. Membina kehidupan masyarakat desa.
7. Membina perekonomian desa.
8. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
9. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
10. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

3. Tugas Kepala Desa

Menurut PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan. Dalam penelitian ini tugas Kepala Desa lebih dilihat dalam urusan pembangunan, terutama dalam proses perencanaan pembangunan. Seberapa jauh keterlibatan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya dalam pembangunan desa seperti yang disebutkan dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 tersebut.

C.Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010:46).

Jadi partisipasi menurut Nyoman Sumaryadi dapat diartikan sebagai peran seseorang dalam pembangunan yang diberikan dalam bentuk tenaga, masukan pikiran, keahlian atau modal.

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, (2001: 201-202) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa.

Jadi dapat diartikan partisipasi sebagai suatu bentuk keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembuatan keputusan.

Conyer dalam Soetomo (2006:312), mengemukakan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat secara sukarela yang didasari oleh kesadaran diri masyarakat itu sendiri dalam program pembangunan.

Jadi partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang yang didasari atas kemauan diri sendiri.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok masyarakat dengan memberikan masukan berupa pikiran, tenaga, maupun uang untuk mempengaruhi atau membuat suatu keputusan atau kebijakan tertentu.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Menurut Watson (dalam Soetomo, 2008:214) mengatakan bahwa ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan antara lain kendala yang berasal dari kepribadian individu salah satunya adalah ketergantungan. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat secara aktif, karena rasa ketergantungan ini masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melaksanakan pembangunan. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat tersebut dapat dibedakan dalam faktor internal dan faktor eksternal, dijelaskan sebagai berikut :

a. Faktor internal

Menurut Slamet (2003:137-143) faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan atau penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri

individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.

b. Faktor eksternal

Menurut Sunarti (dalam jurnal Loka, 2003:9), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), yaitu Dalam hal ini *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator.

Setiap orang memiliki alasan dalam berpartisipasi Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan seseorang dalam berpartisipasi menurut Putnam (1993), adalah berkaitan dengan situasi saling ketergantungan, kepercayaan dan jaringan organisasi sosial yang memfasilitasi kerjasama untuk manfaat bersama.

3. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Menurut Holil dalam Isbandi (2007:21) mengemukakan adanya beberapa bentuk partisipasi antara lain :

- a. Partisipasi dalam bentuk tenaga adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
- b. Partisipasi dalam bentuk uang adalah bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan untukmemperlancar usaha-usaha bagi pencapaian suatu program

pembangunan. Partisipasi ini dapat berupa sumbangan berupa uang tetapi tidak dipaksakan yang diberikan oleh sebagian atau seluruh masyarakat untuk suatu kegiatan atau program pembangunan.

c. Partisipasi dalam bentuk harta benda adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.

Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (2001:38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

a. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

b. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya

4. Upaya untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Menurut Ndraha (1987 : 27-28), upaya yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat antara lain :

1. Memberi stimulasi kepada masyarakat dengan mengharapkan timbulnya respon yang dikehendaki
2. menyesuaikan program pemerintah dengan kebutuhan (keinginan) yang telah lama dirasakan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

3. menumbuhkan dan menanamkan kesadaran akan kebutuhan dan atau perlunya perubahan di dalam masyarakat dan dalam diri anggota masyarakat sedemikian rupa sehingga timbul kesediaan berpartisipasi.

Dalam upaya membangkitkan partisipasi masyarakat, komunikasi mempunyai peranan penting dalam memelihara hubungan secara timbal balik, di satu pihak pemerintah menyampaikan kebijakan kepada masyarakat, sedangkan di lain pihak masyarakat menyampaikan gagasan, keinginan atau kebutuhannya kepada pemerintah. Oleh Bryant dan White (1987 : 172) disebutkan bahwa komunikasi yang diperlukan dalam pembangunan desa adalah Komunikasi dari atas kebawah, komunikasi dari bawah keatas dan komunikasi searah. Artinya komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah harus seimbang.

Rolalisasi (2008) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui peningkatan modal sosial yang ada di masyarakat. Partisipasi masyarakat akan meningkat seiring meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap permukiman di sekitarnya serta meningkatnya keterlibatan dalam organisasi sosial.

5. Partisipasi Masyarakat Desa

Menurut Tjokroamidjojo (1996:207) mengemukakan bahwa ada 3 tahap partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pemeliharaan hasil pembangunan. Menurut Uphoff *dalam* Endang (2003:37) mengatakan bahwa partisipasi pembangunan dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi

guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang material, ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.. Sedangkan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan desa dapat terlihat dari kehadiran masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbang desa). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 dalam pasal 1 ayat 11 disebutkan bahwa

”musrenbang adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah)”.

Secara umum ada 2 (dua) jenis definisi partisipasi yang ada di dalam masyarakat. Menurut Soetrisno (1995:221), yaitu:

1. Partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan masyarakat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuan oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam definisi ini pun diukur dengan kemauan masyarakat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan pembangunan.
2. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kerja sama erat antara perencana dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan masyarakat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak masyarakat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka. Ukuran lain yang dapat digunakan adalah ada tidaknya kemauan masyarakat untuk secara

Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi menjadi 3 tahap yaitu dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Hal ini didukung oleh pendapat Cohen dan Uphoff bahwa partisipasi masyarakat dibedakan dalam :

1. perencanaan pembangunan diwujudkan dengan :
 - a. Keikutsertaan dalam rapat
 - b. Keaktifan masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran
2. pelaksanaan pembangunan diwujudkan dengan bentuk partisipasi. Wujud nyata partisipasi dapat berupa tenaga, uang, dan harta benda.
3. Evaluasi pembangunan diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta dalam mengawasi dan menilai atau secara tidak langsung, misalnya memberikan saran-saran, kritikan atau protes.

D. Pembangunan Desa

1. Pengertian Pembangunan Desa

Menurut Taliziduhu (1987 : 54) Pembangunan desa sebagai suatu proses dengan upaya masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan wewenang pemerintah untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat dan kemungkinan mereka diberi sumbangan penuh kepada kemajuan nasional

Dari pengertian Taliziduhu di atas, pembangunan desa dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menciptakan masyarakat desa yang sejahtera dengan campur tangan pemerintah yang memiliki wewenang untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat desa agar lebih maju.

Menurut Agusthoa Kaswata (1985 : 24) pembangunan desa adalah suatu pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan didasarkan pada tugas dan kewajiban masyarakat desa.

Dari pendapat Agusthoa di atas, pembangunan desa dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang diarahkan kepada masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan didasarkan pada tugas dan kewajiban masyarakat desa sendiri.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa adalah suatu proses perubahan yang ditujukan kepada masyarakat desa untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat desa sendiri.

2. Pembangunan Partisipatif

Partisipasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan (Oakley, 1991 : 14). Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1976 : 222-224) ciri-ciri pembangunan partisipatif adalah :

1. Terlibatnya dan ikut sertanya masyarakat sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara , turut menentukan arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
2. Meningkatnya kemampuan untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik
4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang terencana

Menurut Parwoto (1997 : 103) ciri-ciri pembangunan yang partisipatif adalah :

1. proaktif atau sukarela (tanpa disuruh)
2. adanya kesepakatan yang diambil bersama oleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebut
3. adanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut
4. adanya pembagian kewenangan dan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsur/pihak yang terlibat.

3. Pembangunan Non Partisipatif

Menurut Kartasmita (1997) pembangunan non partisipatif dapat terjadi sebab

- a. pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat dan tidak menguntungkan rakyat banyak
- b. pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat, tetapi banyak yang kurang memahami maksud itu
- c. pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman tersebut.
- d. pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi rakyat tidak diikutsertakan

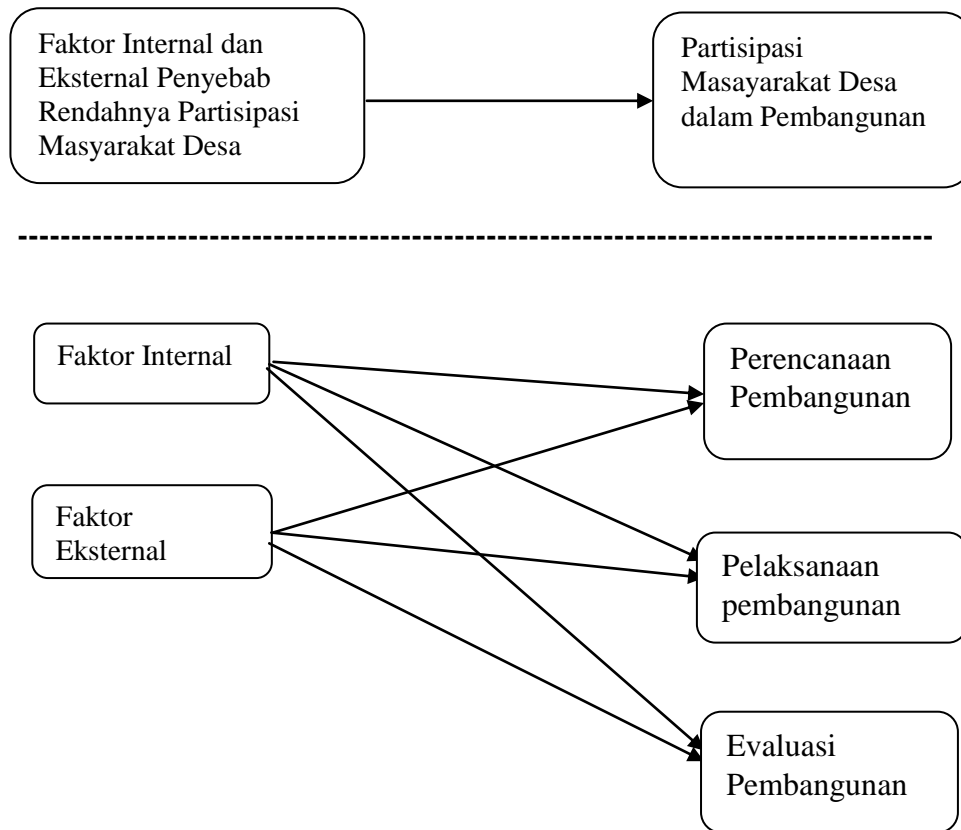
Menurut Conyers (1991 : 154) menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan menjadi kunci keberhasilan

pembangunan. Ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
3. Kepercayaan semacam ini adalah penting khususnya bila mempunyai tujuan agar dapat diterima oleh masyarakat.
4. Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan mereka pun mempunyai hak untuk turut (memberikan saran) dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan non partisipatif adalah pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam hal ini keputusan yang dimaksud adalah keputusan dalam menentukan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa. Tidak adanya partisipasi atau peran serta dari masyarakat, maka program-program pembangunan yang akan dijalankan tidak dapat terealisasi dengan baik. Sehingga, dalam desa tersebut tidak memiliki perubahan ke arah yang lebih baik.

E. Kerangka Pikir



G.Hipotesis

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Sugiyono bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, maka hipotesis penelitian ini adalah :

1. Ho : faktor internal disebabkan oleh tingginya pendidikan masyarakat dan faktor eksternal disebabkan oleh kepala desa yang aktif
2. Ha : faktor internal disebabkan oleh rendahnya pendidikan masyarakat dan faktor eksternal disebabkan oleh kepala desa yang non aktif

Kesimpulan pada bab ini yaitu penulis menggunakan konsep partisipasi yang dikemukakan oleh I Nyoman Sumaryadi yang mengatakan bahwa partisipasi pembangunan adalah peran serta seseorang dalam proses pembangunan. Proses pembangunan yang dimaksud adalah proses pembangunan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Peran serta masyarakat dalam tahap-tahap pembangunan dapat dibedakan melalui bentuk sumbangan yang diberikan antara lain berupa uang, materi atau tenaga.

Selain konsep partisipasi, konsep lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Watson yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Sementara faktor eksternal meliputi *stakeholder* yang terlibat dalam proses pembangunan yaitu pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat dan konsultan/fasilitator.